

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama pembangunan pada tingkat wilayah. Penerapan kebijakan otonomi daerah memberikan ruang kewenangan dan peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang dimilikinya. Salah satu peluang tersebut adalah pentingnya memperjelas orientasi pembangunan yang berlandaskan pada potensi lokal. Setiap pemerintah daerah dituntut tidak hanya berperan aktif dan inisiatif dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga mampu mengidentifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemampuan tersebut pemerintah daerah benar-benar dapat berperan sebagai aktor utama pembangunan di wilayahnya masing-masing, sementara itu pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan nasional (Prawoto, 2010).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan wilayah masing-masing. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor strategis yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu sektor yang menjadi kewenangan penting pemerintah daerah adalah sektor pertanian, mengingat perannya yang signifikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan pangan, serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Pembangunan sektor pertanian dipandang sangat krusial dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah sebagai bagian

dari upaya memperkuat struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan pertanian merupakan prioritas utama negara karena selain melihat dari sisi ekonomi, Indonesia secara historis dan struktural merupakan negara agraris dengan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Pada masa lalu, pembangunan pertanian menghadapi kendala karena pendekatan sentralistik atau top-down yang kurang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah secara komprehensif, sehingga kebijakan yang diterapkan sering kali tidak efektif dan menyebabkan banyak potensi wilayah tidak berkembang secara optimal. Reformasi kebijakan melalui penerapan otonomi daerah membawa perubahan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan wilayah. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah secara normatif memiliki peluang lebih besar untuk mendorong pembangunan pertanian yang terarah, terencana, dan adaptif terhadap kondisi lokal, meskipun dalam praktiknya tingkat keberpihakan dan efektivitas kebijakan pertanian sangat bergantung pada komitmen dan prioritas masing-masing daerah (Suharwanto, 2023).

Hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor utama pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 12,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya sektor strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan (BPS, 2025). Selain itu, sektor pertanian menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, terdapat kurang lebih 40,76 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut sekitar 29% dari total penduduk bekerja atau sebanyak 135,61 juta jiwa, menjadikan sektor ini sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya (BPS, 2025). Hal ini menunjukkan pembangunan pertanian bukan hanya penting bagi stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, melalui pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia (Triana, 2024).

Dalam konteks pembangunan wilayah, peran sektor pertanian juga tercermin secara nyata di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini dikenal sebagai wilayah strategis dalam struktur perekonomian kawasan Indonesia Timur, terutama sebagai pemasok utama berbagai komoditas pertanian (Yusran et al., 2023). Dominasi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan menempatkannya sebagai salah satu produsen utama sektor pertanian di tingkat nasional. Pada tahun 2023, kontribusi sektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi keenam di Indonesia, yakni mencapai 5,52% terhadap PDRB Indonesia. Di tahun yang sama, sektor pertanian berkontribusi sebesar 21,69% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan, sehingga menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah (BPS Sulawesi Selatan, 2024). Kondisi geografis yang relatif menguntungkan menjadi faktor utama tingginya produktivitas komoditas pertanian di wilayah tersebut, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Selain itu, keunggulan agroklimat seperti iklim dan curah hujan yang cukup turut mendukung Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra pertanian sekaligus lumbung pangan nasional (Yusran et al., 2023).

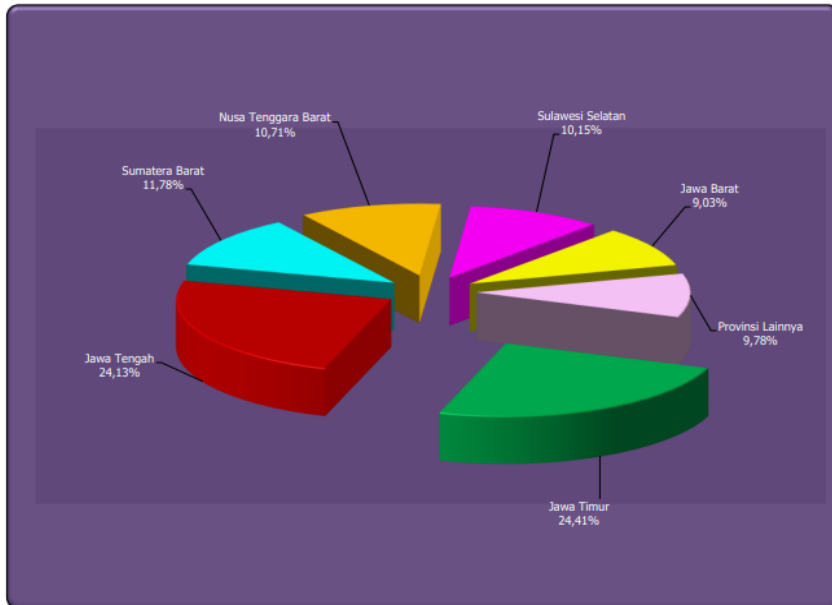
Sejalan dengan peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra pertanian nasional, Kabupaten Enrekang wilayah di Sulawesi Selatan dengan struktur perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Sekitar 56,10% persen masyarakat Kabupaten Enrekang bekerja sebagai petani atau terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan bidang pertanian, disusul sektor jasa 34,19% dan sektor manufaktur sebesar 9,7% (BPS Kabupaten Enrekang, 2024). Data tahun pada 2023 juga menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 40,65 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang (BPS Enrekang, 2024). Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai penopang utama perekonomian daerah terhadap pendapatan regional. Tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat

pada sektor ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang, utamanya petani sebagai pelaku utama sektor tersebut. Dominasi sektor pertanian di Kabupaten Enrekang melandasi kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan Kabupaten Enrekang sebagai kawasan agropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan (BPS Kabupaten Enrekang, 2024).

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sektor pertanian yang paling umum dikembangkan oleh petani di Kabupaten Enrekang (Suradi et al., 2022). Komoditas ini telah berkembang sebagai komoditas strategis dan berkontribusi besar terhadap pendapatan petani serta menjadi identitas pertanian daerah. Secara nasional, bawang merah merupakan komoditas penting karena merupakan kebutuhan harian masyarakat Indonesia sebagai bumbu masak dan komponen pangan. Bawang merah juga digunakan dalam obat-obatan tradisional dan medis (Hayati et al., 2022). Bawang merah menjadi komoditas pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi salah satu komoditas yang selalu ada di pasaran. Bawang merah menjadi komoditas prioritas dalam pengembangan sayuran di Indonesia dan memiliki peluang besar untuk menjangkau pasar nasional maupun pasar internasional (Arniati et al., 2023). Menurut Rukmana, bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dilihat dari aspek pemenuhan konsumsi nasional, sebagai sumber pendapatan bagi petani, serta potensinya untuk menghasilkan devisa bagi negara (Lekik et al., 2022).

Berdasarkan rata-rata produksi bawang merah tahun 2019 hingga tahun 2023, setidaknya terdapat enam provinsi sentra utama bawang merah yang menyumbang 90,22% dari total produksi bawang merah di Indonesia. Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai produsen bawang merah terbesar dengan kontribusi sebesar 24,41%. Menjadikannya pusat produksi bawang merah nasional. Diposisi kedua dan ketiga terdapat Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Barat diposisi kedua dan ketiga yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 24,13% dan 11,78% dari total produksi nasional. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat diposisi ke empat

dengan kontribusi sebesar 10,71%, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di urutan kelima dengan angka 10,15%, dan Jawa Barat dengan kontribusi 9,03% berada di urutan keenam dari total produksi bawang merah di Indonesia. Adapun provinsi-provinsi yang lainnya menyumbang sekitar 9,78% total produksi bawang merah nasional (Kementerian Pertanian, 2024).

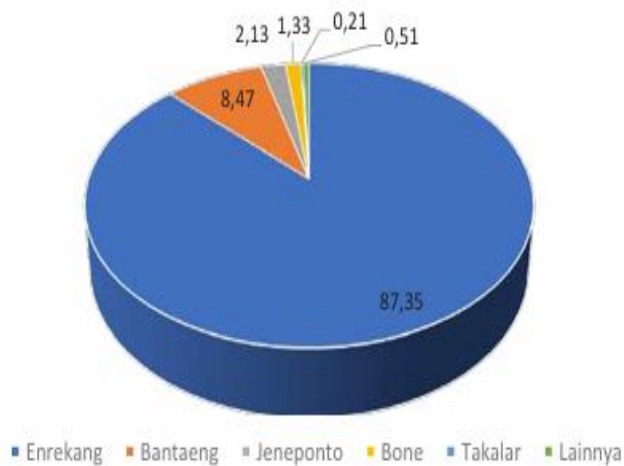


**Gambar 1. 1 Provinsi Sentra Produksi Bawang Merah Di Indonesia Tahun 2019-2023**

*Sumber: Kementerian Pertanian, 2024*

Sebagai daerah yang memiliki keunggulan komparatif sektor hortikultura, Kabupaten Enrekang menempati posisi strategis sebagai sentra utama sekaligus produsen terbesar bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang berkontribusi sebesar 87,35% dari total produksi bawang merah provinsi. Besarnya kontribusi menempatkan Kabupaten Enrekang jauh di atas daerah lain seperti Bantaeng, Jeneponto, Bone, dan Takalar. Disisi lain tingginya volume produksi bawang merah menjadikan Kabupaten Enrekang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan, tetapi juga menghasilkan surplus produksi yang signifikan

dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Hasil surplus produksi setidaknya didistribusikan ke 15 provinsi di Indonesia, seperti Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua. Selain itu, produksi bawang merah Kabupaten Enrekang telah mampu berdaya saing di pasar internasional. Sejak tahun 2017, bawang merah Kabupaten Enrekang tercatat menembus pasar Vietnam (BPS Sulawesi Selatan, 2024)



**Gambar 1. 2 Presentase Produksi Bawang Merah di Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten (Persen), 2023**

*Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2024*

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 menunjukkan bawang merah menjadi tanaman sayuran dengan produksi terbesar dibandingkan komoditas hortikultura lainnya di wilayah tersebut (BPS Enrekang, 2024). Produksi bawang merah di Kabupaten Enrekang pada tahun tersebut kurang lebih mencapai 1.759.330 Kw, jauh melampaui tanaman sayuran lainnya, seperti produksi tanaman kubis yang mencapai 344.145 Kw serta tanaman tomat dengan jumlah produksi 294.571 Kw. Besaran produksi tanaman bawang merah pada tahun tersebut, sekaligus menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai produsen bawang merah terbesar ke-4

di Indonesia setelah Brebes, Solok, dan Ngajuk (Pilar Pertanian, 2024). Kecamatan Anggeraja tercatat sebagai produsen utama dengan produksi bawang merah pada tahun tersebut mencapai 1.383.900 Kw. Hal ini menjadikan Kecamatan Anggeraja sebagai sentra utama bawang merah di daerah tersebut (BPS Kabupaten Enrekang, 2024).

No	Kecamatan	Produksi Bawang Merah (Kuintal/Kw)	Produksi Kubis (Kuintal/Kw)	Produksi Tomat (Kuintal/Kw)
1.	Maiwa	1.000	-	-
2.	Bungin	5.780	-	900
3.	Enrekang	19.580	-	1.125
4.	Cendana	-	-	-
5.	Baraka	109.760	72.650	36.300
6.	Buntu Batu	12.310	11.400	25.900
7.	<b>Anggeraja</b>	<b>1.383.900</b>	5.000	2.350
8.	Malua	69.110	600	8.975
9.	Alla	26.902	48.375	23.569
10	Curio	2.940	2.400	85.400
11	Masalle	127.224	181.720	102.123
12	Baroko	824	22.000	7.929
Total		1.759.330	344.145	294.571

**Tabel 1. 1 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Enrekang**  
*Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2024*

Tingginya tingkat produksi bawang merah di Kabupaten Enrekang menjadikan komoditas hortikultura ini sebagai salah satu komoditas unggulan sektor pertanian daerah. Bawang merah sebagai komoditas unggulan pertanian daerah tidak terlepas dari kesesuaian kondisi agroklimat Kabupaten Enrekang yang didominasi oleh daerah dataran tinggi dengan topografi pegunungan dan perbukitan dengan iklim yang sejuk dan ketersediaan air yang cukup. Secara fisiologis

tanaman bawang merah memerlukan suhu udara yang relatif sejuk, ketersediaan air yang memadai, serta kondisi lingkungan yang stabil untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal (Sugiartini et al., 2018). Dari segi ekonomi pertanian bawang merah memberikan keuntungan ekonomi yang relatif cepat karena memiliki siklus tanam pendek, yaitu sekitar 2 hingga 3 bulan, sehingga memungkinkan petani memperoleh pendapatan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan komoditas pertanian lain. Faktor-faktor tersebut menjadikan pertanian bawang merah sebagai usaha tani utama oleh masyarakat Kabupaten Enrekang (Arniati et al., 2023).

Penetapan komoditas unggulan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi wilayah. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi sektor dan komoditas yang berpotensi tumbuh cepat, memiliki keunggulan kompetitif, dan sesuai dengan karakteristik wilayah agar pengembangannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pemilihan komoditas unggulan juga harus mempertimbangkan prospek pemasaran, baik untuk kebutuhan dalam daerah, luar daerah, maupun peluang ekspor sehingga komoditas tersebut memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Komoditas unggulan perlu memiliki daya saing yang kuat dan mampu dikembangkan secara maksimal melalui dukungan kebijakan, teknologi, dan investasi (Humaidi et al., 2020). Penetapan komoditas unggulan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah karena mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Daerah yang mampu mengembangkan komoditas unggulannya secara optimal tentunya akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih efektif dan efisien (Jauhari, 2020).

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024–2026 menetapkan bawang merah sebagai salah satu komoditas unggulan daerah karena kontribusinya yang sangat signifikan terhadap sektor pertanian. Penetapan ini didasarkan pada tingginya nilai produksi bawang merah yang melampaui komoditas hortikultura lainnya di Kabupaten Enrekang. Dengan luas panen yang mencapai

13.880 hektar, bawang merah menjadi komoditas yang paling dominan menjadi usaha tani masyarakat Kabupaten Enrekang dan memberikan kontribusi besar terhadap total produksi pertanian hortikultura daerah tersebut (BPS Enrekang, 2024). Bawang merah dipandang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, perluasan perdagangan seperti ekspor ke pasar nasional dan internasional serta potensi pengembangan industri pengolahan bawang merah. Selain itu, Keberhasilan budidaya bawang merah juga berperan dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan di Kabupaten Enrekang, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Namun, pengembangan bawang merah sebagai komoditas unggulan pertanian masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satunya dalam aspek pemasaran. Sampai saat ini petani bawang merah di Kabupaten Enrekang masih sangat bergantung pada pedagang perantara seperti pengepul dan tengkulak, sebagai jalur utama pemasaran hasil panen. Pola rantai distribusi yang didominasi pedagang perantara secara signifikan melemahkan posisi tawar petani di pasar. Umumnya petani seringkali tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan harga jual, karena harga ditetapkan sepihak para pedagang perantara yang menjadi satu-satunya penghubung petani dan pasar. Kondisi mengakibatkan harga yang diterima petani lebih rendah dari harga pasar akhir. Petani hanya menikmati sekitar 40% dari harga jual sedangkan para pedagang menikmati 60% sisanya. Ketimpangan ini sangat tidak adil, mengingat sektor pertanian bawang merah merupakan komoditi yang diandalkan untuk menambah penghasilan petani (Yudi, 2018).

Minimnya akses petani terhadap informasi harga pasar sebenarnya dan terbatasnya akses ke saluran distribusi alternatif ikut melemahkan petani dalam rantai pemasaran. Dalam laporan yang dirilis oleh Project Multatuli, digambarkan bahwa meskipun petani bawang merah di Enrekang telah mencapai produktivitas yang tinggi, akan tetapi mereka tetap terjebak dalam rantai distribusi yang panjang. Dalam laporan tersebut, kondisi ini disebut sebagai “Dilema Kompleks”, dimana petani terlihat Makmur dari segi produksi, namun

kenyataannya mereka hidup dalam tekanan pendapatan yang rendah dan hutang modal. Produktivitas yang tinggi kerap dihadapkan pada fluktuasi harga yang tajam di tingkat pemasaran. Bahkan data dilapangan menunjukkan bahkan petani tidak mendapatkan apa-apa jika harga bawang anjlok. Kondisi tersebut diperburuk oleh permainan harga yang dilakukan para pedagang perantara, dimana memberikan harga tidak sesuai dengan kondisi pasar sebenarnya. Skema semacam ini seringkali menyebabkan hasil panen dijual secara paksa di bawah harga pasar sebenarnya demi melunasi hutang. Siklus tersebut terus berulang dari waktu ke waktu tanpa adanya perbaikan yang signifikan (Rusdianto, 2023).

Keterbatasan akses permodalan turut menjadi kendala utama yang dirasakan para petani bawang dalam pengelolaan usaha tani bawang di Kabupaten Enrekang. Petani sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dana yang cukup untuk biaya produksi terutama pada awal musim tanam, seperti dalam pembelian bibit, pupuk dan pestisida yang memerlukan modal relatif besar. Meskipun pemerintah telah menyediakan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, pemanfaatan oleh petani bawang merah di Kabupaten Enrekang masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada persyaratan administrasi, terutama terkait kepemilikan jaminan (collateral) dan dokumen legalitas usaha tani yang sering kali tidak dimiliki oleh petani skala kecil. Rendahnya literasi keuangan juga menjadi hambatan tambahan. Banyak petani belum memahami pengajuan kredit formal, bunga efektif, maupun prosedur pelaporan penggunaan dana, sehingga petani merasa takut dan ragu untuk mengakses produk perbankan seperti KUR (Hariani et al., 2022).

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian menjadi tantangan serius dalam pengembangan sektor pertanian. Kurangnya pendampingan teknis dan birokrasi yang rumit menjadi hambatan utama, meskipun minat petani untuk mengembangkan usaha tani cukup tinggi. Bidang penyuluhan pertanian berperan strategis sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama, yaitu petani agar mereka dapat mengorganisasikan dirinya dalam rangka mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya

lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran terhadap pertanian yang berkelanjutan (Ibrahim et al, 2022). Data BRI Unit Cakke mencatat bahwa wilayah Anggeraja, sebagai sentra produksi bawang merah di Enrekang, memiliki potensi besar dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan total penyaluran dana mencapai lebih dari Rp55,16 miliar pada tahun 2020-2021. Namun demikian, modal KUR lebih terbuka dan mudah diakses oleh petani yang memiliki usaha berjalan dan memenuhi kriteria perbankan. Hal ini menyebabkan petani baru dan petani yang belum terorganisir mengalami keterbatasan dalam mengakses KUR (Hariani et all, 2022).

Permasalahan permodalan semakin kompleks akibat ketidakpastian iklim yang seringkali meningkatkan modal kerja, seperti untuk pengadaan pompa air dan sistem irigasi. Ketersediaan sistem pengairan yang efisien dan merata menjadi faktor penting menjaga pertumbuhan tanaman bawang merah, mengingat komoditas ini sangat sensitif terhadap perubahan musim dan intensitas penyiraman. Tingginya modal yang dibutuhkan untuk membangun sistem pengairan ditambah kurangnya akses pembiayaan yang memadai mengakibatkan para petani kesulitan memenuhi kebutuhan paling utama tersebut, terutama petani skala kecil (Fauzia et all, 2025). Hal ini berdampak langsung pada efisiensi produksi dan produktivitas mengingat bawang merah merupakan komoditas pertanian yang sangat peka terhadap perubahan musim dan intensitas penyiraman. Tanaman bawang merah memiliki kebutuhan air yang relatif tinggi, terutama pada fase pembentukan umbi yang sangat menentukan hasil panen (Antriyandati et all, 2023). Modal kerja berperan penting dalam pengadaan sarana produksi dan pembayaran tenaga kerja. Keterbatasan modal menjadi kendala yang perlu diatasi dalam pengembangan bawang merah (Sudarmanto, 2023).

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu kendala utama pengembangan komoditas pertanian bawang merah di kabupaten Enrekang. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 menegaskan infrastruktur yang terbatas dan belum memadai khususnya jaringan jalan berdampak langsung pada

kelancaran petani memasarkan hasil panennya, utamanya bawang merah yang membutuhkan distribusi yang cepat guna menjaga mutu dan nilai jualnya (Kementerian Pertanian, 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2021-2023, proporsi ruas jalan yang sudah bermuka beton di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 51,82%. Sisanya masih berupa jalan beraspal tipis (14,19%), berkerikil (23,08%), dan bahkan bertanah (10,90%) (BPS Kabupaten Enrekang, 2024). Meskipun terdapat penurunan jumlah jalan rusak berat dibanding tahun sebelumnya, secara umum aksesibilitas jalan di kawasan pertanian, khususnya di daerah sentra produksi bawang merah masih sangat terbatas.

Kondisi jalan yang rusak atau belum ditingkatkan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya biaya distribusi dalam sistem distribusi hasil pertanian, terutama untuk komoditas yang mudah rusak. Jalan tanah yang berlubang dan licin pada musim hujan menyulitkan proses pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian menuju pasar atau pusat distribusi, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan distribusi. Disisi lain juga, kondisi jalan kerikil yang tidak rata menimbulkan guncangan selama perjalanan yang berpotensi mempercepat penurunan mutu hasil pertanian dan meningkatkan risiko kerusakan produk. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jembatan kecil, saluran irigasi permanen, serta jalan yang belum layak menyebabkan proses budidaya dan distribusi hasil pertanian menjadi tidak efisien. Akibatnya, petani harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi, waktu tempuh yang lebih lama, serta penurunan produktivitas. Kondisi tersebut pada akhirnya mengganggu efisiensi sektor pertanian dan menghambat optimalisasi potensi produktivitas yang seharusnya dapat dicapai (Anjani, 2025).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bawang merah sebagai komoditas unggulan seperti pemasaran, permodalan dan infrastruktur, menciptakan tantangan besar dalam upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan para petani bawang merah itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Upaya ini

sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sektor pertanian berdasarkan potensi lokal, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan peran negara dalam melindungi dan memberdayakan petani demi terwujudnya kesejahteraan mereka. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ini, diharapkan tidak hanya produktivitas bawang merah yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah dapat terjaga dalam jangka panjang.

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menegaskan peran strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pertanian daerah. Melalui regulasi ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan diberikan kewenangan yang jelas dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program pembangunan pertanian, serta melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan pertanian. Kewenangan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi komoditas unggulan lokal, termasuk bawang merah yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Enrekang. Dengan fungsi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, Dinas TPHP bersama dinas terkait diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta keberlanjutan pengembangan komoditas bawang merah. Peran ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui dukungan kebijakan, program teknis, dan penguatan kelembagaan pertanian di tingkat daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Enrekang”**.

### **1.1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam memperkuat akses pemasaran pertanian bawang merah?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menangani keterbatasan akses permodalan pertanian bawang merah?
3. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Enrekang meningkatkan infrastruktur pertanian guna mendukung pengembangan pertanian bawang merah?

### **1.1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kabupaten Enrekang dalam memperkuat akses pemasaran pertanian bawang merah.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menangani keterbatasan akses permodalan pertanian bawang merah.
3. Untuk mengetahui kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan infrastruktur pertanian.

### **1.1.3. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi sumber referensi tambahan bagi para mahasiswa dalam mengkaji studi ilmu pemerintahan terutama terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan masukan, saran dan evaluasi kepada semua pihak khususnya pada pemerintah dan masyarakat.

### 3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ilmiah lainnya yang memiliki fokus serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## 1.2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Menurut Creswell (2014) dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, tinjauan pustaka berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memperkuat argumen penelitian dan menunjukkan keterkaitan antara studi yang sedang dilakukan dengan temuan atau teori sebelumnya. Dalam konteks ini, peneliti merujuk pada literatur yang relevan untuk mengidentifikasi celah penelitian, membangun kerangka pikir, serta mendukung analisis yang dilakukan.

### 1.2.1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pertanian

Menurut Soerjono Soekanto (2009), pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta mengimplementasikan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah diatur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah bertugas untuk mengelola sumber daya, memberikan pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah, serta partisipasi

aktif masyarakat. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014, yang memberikan pedoman pengembangan produk unggulan daerah, diamanatkan bahwa potensi ekonomi daerah harus dikembangkan secara maksimal menjadi produk unggulan yang kompetitif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing, serta didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh (Ganindha & Sukarni, 2020).

Adapun peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat terbagi menjadi 4 peran yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dan katalisator (Firdaus, 2020).

#### 1. Peran pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah sebagai regulator bertugas untuk menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, aturan dan regulasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dengan memberikan pedoman hukum yang jelas, mengawasi kepatuhan terhadap aturan tersebut, serta melindungi kepentingan publik, termasuk petani dan pelaku usaha lainnya. Adapun peran pemerintah sebagai regulator khususnya pada sektor pertanian adalah sebagai berikut (Suwignyo & Wibowo, 2020).

- a. Penyusun kebijakan dan regulasi
- b. Pengawasan dan penegakan hukum
- c. Penyediaan kerangka hukum untuk perlindungan petani
- d. Regulasi pemasaran dan distribusi produk pertanian
- e. Pengaturan sumber daya alam dan lingkungan

#### 2. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan seperti menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Selain itu peran ini juga merujuk pada

penyediaan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong kegiatan sektor pertanian agar dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Sebagai fasilitator, pemerintah berfungsi untuk mempermudah akses petani terhadap berbagai sumber daya, informasi, teknologi, serta peluang yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam konteks pertanian, beberapa peran pemerintah sebagai fasilitator adalah sebagai berikut (Hendrik, 2020).

- a. Penyediaan infrastruktur dan sarana pertanian
- b. Pengembangan dan penyebaran teknologi pertanian
- c. Pemberian akses pembiayaan dan modal
- d. Penyuluhan dan pelatihan kepada petani
- e. Penyediaan informasi pasar dan pemasaran
- f. Membantu mengorganisir kelompok tani
- g. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta

### 3. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah berperan untuk menggerakkan partisipasi multi pihak dengan mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran ini mendorong dan mempercepat perubahan serta inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Dalam konteks pertanian, pemerintah tidak hanya mengatur dan memfasilitasi, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendorong transformasi dan perkembangannya yang lebih cepat di sektor pertanian, baik dalam hal teknologi, manajemen, maupun peningkatan kapasitas petani. Pemerintah berperan dalam menciptakan inisiatif yang mempercepat adopsi inovasi dan menciptakan pasar serta peluang baru bagi sektor pertanian (Kementerian Pertanian, 2021).

### 4. Peran pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi. Sebagai katalisator, pemerintah tidak hanya mengatur dan memfasilitasi, tetapi juga mendorong percepatan dan penguatan perkembangan sektor pertanian dengan menciptakan kebijakan, program, dan inisiatif yang mempercepat penerapan inovasi serta membuka peluang baru yang

mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Pemerintah bertugas untuk mengaktifkan atau "mempercepat reaksi" dalam pengembangan pertanian dengan cara memicu kolaborasi antar pihak, merangsang investasi, dan mendukung perubahan yang diperlukan (Hadi, 2021).

Semakin berkembangnya sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian, serta diharapkan dengan perkembangan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Pendapatan merupakan salah satu indikator ekonomi, dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat mengalami peningkatan yang diikuti oleh meningkatnya produktivitas petani (Arniati et al., 2023).

Secara umum, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan daerah. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang baik, dan menciptakan iklim yang mendukung pembangunan ekonomi. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Nasution, 2006).

### **1.2.2. Aspek Pemasaran Pertanian**

Pemasaran didefinisikan sebagai kegiatan pemasar dalam menjalankan bisnis (profit atau non profit) guna memenuhi kebutuhan pasar melalui penyediaan barang dan atau jasa, penetapan harga, pendistribusian barang, serta kegiatan promosi melalui proses pertukaran dengan tujuan untuk memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan (Sunarto & Zainuddin, 2017). Sejalan dengan definisi tersebut Stanton dalam Sunarto & Zainuddin, 2017 ikut mendefinisikan pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli yang potensial.

Pemasaran pertanian merupakan salah satu unsur fundamental dalam pembangunan pertanian karena berhubungan langsung

dengan kemampuan petani menjual hasil produksinya secara layak. Mosher dalam Dumasari (2020), menempatkan pasar hasil pertanian sebagai salah satu syarat pokok pembangunan pertanian, sebab tanpa keberadaan pasar yang mudah diakses, peningkatan produksi tidak akan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Pasar menjadi sarana utama bagi petani untuk menyalurkan hasil panen sekaligus memperoleh pendapatan yang berkelanjutan. Keberadaan pasar yang berfungsi dengan baik memberikan kepastian bagi petani bahwa hasil usahanya dapat terserap dan dihargai secara wajar. Pembangunan pertanian yang mengabaikan aspek pemasaran berpotensi menempatkan petani pada kondisi rentan terhadap kerugian.

Hal ini dikarenakan posisi petani sering kali berada pada mata rantai paling lemah dibandingkan dengan pelaku pemasaran lainnya. Petani umumnya berperan sebagai produsen primer yang memiliki keterbatasan dalam menentukan harga jual hasil panen. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur pemasaran yang menempatkan pedagang perantara sebagai penghubung utama antara petani dan pasar akhir. Mosher dalam Dumasari (2020), mengemukakan bahwa ketika petani tidak memiliki alternatif saluran pemasaran, mereka cenderung bergantung pada pihak lain yang memiliki akses lebih luas terhadap pasar. Ketergantungan tersebut menyebabkan petani tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu dan harga penjualan. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah dan rentan terhadap praktik harga yang merugikan.

Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh keterbatasan petani dalam mengakses informasi pasar. Informasi mengenai harga, permintaan, dan kondisi pasar sering kali dikuasai oleh pelaku pemasaran yang berada di luar petani. Mosher dalam Dumasari (2020) menekankan akses terhadap informasi pasar merupakan faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan petani dalam menjual hasil produksi. Tanpa informasi yang memadai, petani cenderung menjual hasil panen pada saat yang kurang tepat dan dengan harga yang tidak optimal. Keterbatasan informasi ini menyebabkan petani sulit merespons perubahan pasar secara rasional. Kondisi tersebut memperbesar peluang terjadinya ketimpangan distribusi keuntungan dalam rantai pemasaran.

Pentingnya informasi pasar tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga dengan kepastian penyerapan hasil pertanian. Informasi yang akurat memungkinkan petani merencanakan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat kelebihan pasokan. Informasi pasar yang baik, petani akan lebih terdorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, karena mereka yakin hasil panen akan diterima oleh pasar dengan harga yang layak. Sebaliknya, ketidakpastian pasar dapat melemahkan motivasi petani untuk berusaha lebih baik (Dumasari, 2020). Menurut Mosher dalam Dumasari (2020) menempatkan informasi pasar sebagai perangsang produksi yang mendorong keberlanjutan usaha tani.

Aspek pemasaran erat kaitannya dengan efisiensi distribusi hasil pertanian. Mosher dalam Dumasari (2020) menekankan pengangkutan dan kelancaran distribusi merupakan bagian dari syarat pokok pembangunan pertanian. Tanpa sistem distribusi yang memadai, hasil pertanian berisiko mengalami kerusakan sebelum sampai ke pasar, terutama pada komoditas yang mudah rusak. Kondisi ini sangat merugikan petani, karena berkurangnya kualitas maka berkurang harga yang diterima. Pemasaran yang efektif menuntut adanya sarana pendukung yang memungkinkan hasil panen dipasarkan tepat waktu dan dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu, pembangunan pemasaran pertanian tidak dapat dipisahkan dari upaya perbaikan sistem distribusi.

Pemasaran merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Pasar yang berfungsi dengan baik memberikan sinyal ekonomi yang jelas bagi petani untuk mengembangkan usahanya. Ketika petani memperoleh pendapatan yang layak dari hasil panen, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengakses input produksi, teknologi, dan pendidikan yang lebih baik. Kondisi ini menciptakan siklus positif dalam pembangunan pertanian. Sebaliknya, lemahnya sistem pemasaran akan menjerat petani dalam lingkaran produksi rendah dan pendapatan yang tidak stabil. Lebih lanjut pemasaran dipandang sebagai kunci dalam mendorong transformasi pertanian yang berkelanjutan (Dumasari, 2020).

### **1.2.3. Aspek Permodalan Pertanian**

Permodalan dalam usaha tani didefinisikan sebagai seluruh bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang, yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi pertanian untuk menghasilkan output dan meningkatkan pendapatan usaha tani. Secara ekonomi, permodalan mencakup barang dan jasa yang bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja berperan dalam menghasilkan barang-barang baru. Dalam konteks pertanian, permodalan dapat berupa uang tunai, lahan pertanian, pupuk, serta investasi dalam bentuk mesin dan peralatan pertanian, sehingga semakin besar jumlah modal dan semakin baik kualitasnya, maka semakin besar pula dukungannya terhadap peningkatan produksi (Wahab, 2023).

Mosher dalam Dumasari (2020), menempatkan permodalan sebagai bagian dari syarat pelancar pembangunan pertanian yang berfungsi mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Modal dibutuhkan petani untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan produksi, mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Tanpa dukungan modal yang memadai, petani akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan produktivitas usaha taninya serta menjadi penghambat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian tidak hanya cukup mengandalkan peningkatan produksi, tetapi juga harus ditopang oleh ketersediaan modal yang dapat diakses petani.

Modal dalam usaha tani tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi petani. Mosher dalam Dumasari (2020), menjelaskan bahwa petani yang memiliki akses terhadap modal cenderung lebih mampu menggunakan input produksi secara tepat guna dan tepat waktu. Ketersediaan modal memungkinkan petani membeli benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, modal juga berperan dalam pembiayaan tenaga kerja dan kegiatan pascapanen. Modal yang terbatas menyebabkan petani harus terpaksa mengurangi penggunaan input produksi, yang berdampak pada penurunan hasil dan kualitas panen (Dumasari, 2020).

Dalam konteks pembangunan pertanian, Mosher dalam Dumasari (2020) menekankan pentingnya kredit produksi sebagai salah satu instrumen permodalan bagi petani. Kredit produksi dipandang sebagai sarana untuk membantu petani mengatasi keterbatasan modal, terutama pada awal musim tanam. Melalui kredit, petani diharapkan dapat membiayai kegiatan produksi tanpa harus menjual aset atau bergantung pada pihak lain yang berpotensi merugikan. Namun, menurutnya kredit produksi harus dirancang sesuai dengan kondisi dan kemampuan petani. Kredit yang tidak disesuaikan dengan karakteristik usaha tani justru dapat menimbulkan risiko gagal bayar dan memperburuk kondisi ekonomi petani. Sistem kredit pertanian harus benar-benar dikelola secara hati-hati dan berpihak pada kepentingan petani.

Akses petani terhadap permodalan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Mosher dalam Dumasari (2020), menegaskan bahwa kecanggihan teknologi dan ketersediaan modal akan menjadi sia-sia apabila petani tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara efektif. Pendidikan dan penyuluhan menjadi faktor pendukung agar petani mampu memanfaatkan modal secara produktif. Petani yang memiliki pemahaman manajerial yang baik akan lebih cermat dalam menggunakan modal untuk kegiatan yang benar-benar mendukung peningkatan hasil. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan penggunaan modal yang tidak efisien. Hal ini menegaskan bahwa modal dan sumber daya manusia merupakan dua unsur yang saling melengkapi.

Permodalan juga berperan dalam memperkuat kemandirian petani dalam mengelola usaha taninya. Petani yang memiliki akses modal yang cukup akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan produksi dan pemasaran. Kemandirian penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada pihak lain, seperti pedagang atau pemberi pinjaman informal. Ketergantungan terhadap sumber modal informal sering kali menempatkan petani pada posisi yang lemah dan tidak menguntungkan. Dengan dukungan permodalan yang memadai dan terjangkau, petani dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam sistem pertanian. Kondisi ini sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian yang menempatkan petani sebagai subjek utama.

Kerangka syarat pelancar pembangunan pertanian, Mosher dalam Dumasari (2020) menekankan pentingnya kebersamaan petani dalam mengakses permodalan. Kerja sama antarpetani, baik dalam bentuk kelompok maupun kelembagaan, dapat mempermudah akses terhadap kredit dan sumber pembiayaan lainnya. Melalui kebersamaan, risiko usaha dapat ditanggung bersama sehingga beban individu petani menjadi lebih ringan. Selain itu, kelembagaan petani dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Pendekatan kolektif seperti ini tentunya lebih sesuai dengan karakter sosial masyarakat petani. Penguatan kelembagaan petani menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas permodalan pertanian.

#### **1.2.4. Aspek Infrastruktur Pertanian**

Infrastruktur pertanian merupakan bangunan fisik (struktur) yang berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan pertanian. Infrastruktur tersebut meliputi bangunan penyedia air irigasi seperti bendungan, sumur, dan pompa, serta jaringan irigasi, drainase, jalan pertanian, dan jembatan. Keberadaan jembatan berperan penting karena menghubungkan antar lahan usahatani sehingga memperlancar aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian yang dilakukan secara optimal memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas. Ketersediaan, kualitas, dan kesesuaian infrastruktur memungkinkan petani mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menghasilkan lebih dari satu jenis tanaman, serta meningkatkan efisiensi usaha tani dan kepuasan petani (Kalsim, 2010 dalam Ahlaq, 2024).

Infrastruktur pertanian merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Mosher dalam Dumasari (2021) menempatkan pengangkutan sebagai salah satu syarat pokok pembangunan pertanian karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi hasil produksi dari lahan pertanian ke pasar. Tanpa infrastruktur yang memadai, hasil pertanian berisiko mengalami keterlambatan distribusi dan penurunan mutu. Dimana kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani meskipun produksi yang dihasilkan cukup tinggi. Infrastruktur menjadi pondasi penting dalam sistem pembangunan pertanian. Infrastruktur

pertanian menjadi landasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung sistem distribusi hasil pertanian. Jalan yang layak memungkinkan petani mengangkut hasil panen secara cepat dan efisien menuju pasar. Keterlambatan distribusi dapat meningkatkan risiko kerusakan hasil panen, terutama untuk komoditas yang mudah rusak. Kondisi jalan yang buruk akan memperpanjang waktu tempuh dan menambah biaya transportasi. Biaya tambahan pada akhirnya akan ditanggung oleh petani dalam bentuk harga jual yang lebih rendah. Kualitas infrastruktur jalan sangat memengaruhi efisiensi pemasaran hasil pertanian. Perbaikan infrastruktur jalan menjadi bagian integral dalam pembangunan pertanian (Dumasari, 2020).

Ketersediaan sarana pengangkutan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam sistem pertanian. Mosher dalam Dumasari (2020) menekankan pengangkutan bukan hanya soal keberadaan alat transportasi, tetapi juga tentang kemudahan akses petani terhadap sarana tersebut. Petani yang memiliki akses transportasi yang baik akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu penjualan hasil panen. Sebaliknya, keterbatasan sarana pengangkutan dapat memaksa petani menjual hasil panen dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Situasi ini memperlemah posisi tawar petani dalam sistem pemasaran. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi harus diarahkan untuk mendukung kepentingan petani sebagai produsen utama.

Infrastruktur pertanian sangat berkaitan dengan efisiensi biaya produksi dan distribusi. Kelancaran pengangkutan dapat menekan biaya transaksi yang harus dikeluarkan petani. Biaya distribusi yang rendah memungkinkan petani memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari hasil penjualan. Infrastruktur yang tidak memadai akan meningkatkan biaya distribusi dan mengurangi pendapatan bersih petani. Kondisi ini dapat menghambat motivasi petani untuk meningkatkan produksi. Pembangunan infrastruktur pertanian berperan penting dalam menciptakan sistem pertanian yang efisien. Efisiensi tersebut menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan (Dumasari 2020).

Infrastruktur dipandang sebagai sarana pendukung yang memungkinkan petani mengakses pasar secara lebih luas. Infrastruktur yang baik membuka peluang bagi petani untuk menjual hasil panen ke pasar yang lebih menguntungkan. Akses pasar yang luas memberikan alternatif bagi petani sehingga tidak bergantung pada satu saluran pemasaran saja. Melalui hal tersebut petani mampu memperkuat posisi tawar mereka dalam menentukan harga jual. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur akan mempersempit pilihan pasar dan meningkatkan ketergantungan petani pada pihak tertentu. Pembangunan infrastruktur pertanian sangat berkontribusi pada peningkatan petani (Dumasari, 2020).

Infrastruktur pertanian juga memiliki peran penting dalam menjaga mutu hasil produksi. Mosher dalam Dumasari (2020), menegaskan hasil pertanian harus segera dipasarkan setelah panen untuk menghindari kerusakan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi hasil panen dilakukan secara cepat dan aman. Keterlambatan distribusi akibat infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas dan nilai jual hasil pertanian. Petani yang diposisikan dalam keadaan merugi akibat hasil panen yang rusak mengalami pendapatan yang tidak optimal. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjaga nilai ekonomi hasil pertanian sekaligus penunjang nilai mutu produk pertanian (Dumasari, 2020).

#### **1.2.5. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian**

Di Indonesia, sektor pertanian terbagi menjadi lima subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor peternakan. Sektor pertanian tidak dipandang sebagai sektor yang pasif seperti sektor industri, melainkan sebagai sektor yang dinamis. Pembangunan pertanian didorong oleh faktor penawaran dan fungsi produksi yang diperkuat melalui riset, inovasi teknologi pertanian yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi di pedesaan, serta investasi besar dari pemerintah. Saat ini, sektor pertanian bahkan dianggap sebagai sektor utama (*leading sector*) yang diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor-sektor lainnya (Charles et al., 2018).

Penentuan sektor unggulan menjadi sebuah hal yang penting sebagai dasar perencanaan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kewenangan dan kesempatan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi sektor mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan yaitu (Charles et all., 2018) :

1. Sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar.
3. Sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang.
4. Sektor unggulan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Pengembangan pertanian yang berbasis pada komoditas unggulan daerah sejalan dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014, dimana pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mengidentifikasi dan mengembangkan komoditas pertanian yang memiliki potensi tinggi dan dapat bersaing di pasar. Dengan mengoptimalkan komoditas unggulan pertanian seperti bawang merah, kopi, atau komoditas khas lainnya, daerah dapat meningkatkan daya saingnya, memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, pengembangan pertanian yang berfokus pada produk unggulan juga memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, agar para petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap teknologi, pelatihan, serta layanan yang mendukung produktivitas dan efisiensi. Peningkatan daya saing produk pertanian ini tentunya juga akan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama jika didukung oleh kebijakan yang proaktif dalam perencanaan daerah yang terkait dengan sektor pertanian (Supriyadi, 2019).

Adapun aspek utama dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian menurut Bappenas (2021) yaitu :

1. Identifikasi Komoditas Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dimulai dengan identifikasi komoditas yang memiliki potensi pasar tinggi dan dapat tumbuh

secara berkelanjutan di daerah tertentu. Proses ini melibatkan kajian mengenai keunggulan komparatif, kondisi iklim, serta ketersediaan sumber daya alam.

## 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi

Untuk mengembangkan komoditas unggulan, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk pertanian. Ini bisa dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian yang modern, penggunaan varietas unggul, serta penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien.

## 3. Peningkatan Akses ke Pasar

Salah satu langkah penting dalam pengembangan komoditas unggulan adalah meningkatkan akses petani atau pelaku sektor pertanian ke pasar yang lebih luas. Ini mencakup pasar domestik dan internasional. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk membuka saluran distribusi yang lebih efisien serta mempromosikan produk unggulan ke pasar global.

## 4. Pemberdayaan Petani dan Penguatan Kelembagaan

Pengembangan komoditas unggulan juga melibatkan pemberdayaan petani melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau asosiasi petani juga penting untuk meningkatkan daya tawar mereka terhadap pasar.

## 5. Diversifikasi dan Pengolahan Produk

Untuk meningkatkan nilai tambah, pengolahan produk pertanian juga menjadi bagian penting dari pengembangan komoditas unggulan. Produk setengah jadi atau olahan dari komoditas unggulan dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan lebih mudah dipasarkan.

Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian merujuk pada upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditas pertanian tertentu yang memiliki potensi pasar yang tinggi dan memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi daerah atau negara. Komoditas unggulan pertanian sering kali dipilih berdasarkan beberapa kriteria, seperti daya saing di pasar internasional, permintaan pasar yang tinggi, serta kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi lokal. Pengembangan komoditas unggulan bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan

pendapatan petani, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional.

### **1.2.6. Bawang Merah Sebagai Komoditas Unggulan**

Bawang merah merupakan salah satu jenis komoditi hortikultura yang tergolong sebagai sayuran rempah. Sayuran rempah ini banyak dibutuhkan terutama sebagai pelengkap bumbu masakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Selain itu, bawang merah juga digunakan sebagai obat tradisional yang memiliki banyak manfaat seperti dapat membantu mencegah penyakit kanker. Manfaat bawang merah lainnya antara lain melegakan tenggorokan, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan imunitas tubuh. Oleh sebab itu bawang merah memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi (Listiono, 2016). Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen terbesar bawang merah di Asia Tenggara. Selain itu, bawang merah juga dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah dan iklim, meskipun lebih optimal di daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk dan kelembaban yang cukup. Keunggulan bawang merah juga terletak pada kemampuannya untuk menjadi komoditas yang memiliki daya tahan lama setelah panen, terutama jika melalui proses pengeringan.

Bawang merah sebagai komoditas unggulan memiliki banyak peluang besar untuk bersaing. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi usaha tani yang dicapai oleh petani maka akan menunjukkan keberhasilan petani dalam menjalankan usahanya secara ekonomi. Oleh sebab itu, pengembangan usaha tani bawang merah harus diarahkan untuk mewujudkan agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi yang baik (Supatminingsih et al., 2023).

Pengembangan bawang merah sebagai komoditas unggulan dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari peningkatan produktivitas melalui penggunaan varietas unggul, teknologi budidaya yang efisien, hingga peningkatan kualitas hasil panen untuk memenuhi standar pasar. Selain itu, keberlanjutan produksi juga menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan bawang merah, mengingat permintaan yang terus meningkat setiap tahun. Penggunaan teknologi pertanian yang modern, seperti irigasi tetes

dan penggunaan pestisida ramah lingkungan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil dan kualitas bawang merah.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program memberikan dukungan dalam pengembangan bawang merah sebagai komoditas unggulan. Dukungan tersebut antara lain berupa penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya yang efisien, bantuan pembiayaan untuk pengadaan alat-alat pertanian, serta upaya meningkatkan infrastruktur yang mendukung distribusi hasil pertanian, seperti jalan dan fasilitas pengolahan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam membuka pasar ekspor bagi produk bawang merah, mengingat komoditas ini memiliki potensi besar untuk diperkenalkan di pasar internasional. Dengan kualitas yang semakin meningkat, bawang merah Indonesia memiliki potensi besar untuk ekspor, terutama ke negara-negara Asia dan Timur Tengah (Fitria & Lestari, 2019). Untuk memaksimalkan peluang ini, perlu ada penguatan sistem pemasaran, standarisasi kualitas produk, dan peningkatan daya saing melalui pengolahan produk berbasis nilai tambah. Pengembangan pasar ekspor dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi fluktuasi harga di pasar domestik serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani (Bappenas, 2021).

Meskipun bawang merah memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga yang cukup tinggi, yang seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Selain itu, kendala dalam hal distribusi dan infrastruktur yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi bawang merah ke berbagai daerah. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga berpotensi mempengaruhi produksi bawang merah, mengingat komoditas ini cukup sensitif terhadap kondisi cuaca.

Bawang merah merupakan komoditas yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengembangan bawang merah harus melibatkan inovasi dalam budidaya, pengolahan, serta pemberdayaan petani. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pengembangan bawang merah sebagai komoditas unggulan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Bawang merah tidak hanya memiliki nilai konsumsi yang tinggi, tetapi juga berpotensi menjadi komoditas yang sangat strategis dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia. Sebagai bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh rumah tangga Indonesia, bawang merah juga menjadi komoditas yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung sektor agribisnis.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Metode kualitatif bersifat dinamis, sehingga perubahan, penambahan, dan penggantian selalu memungkinkan selama proses analisis (Universitas Negeri Surabaya, 2023). Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami makna dan konteks yang tidak dapat dicapai hanya dengan metode kuantitatif yang lebih terstruktur. Creswell (2014) mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang menggali pandangan dan pengalaman individu secara rinci.

Pemilihan pendekatan kualitatif sangat sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali lebih dalam mengenai peran pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian khususnya pertanian bawang merah.

### **2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki sektor pertanian sebagai bagian penting dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat. Kabupaten Enrekang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan, dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran penting pertanian dalam kehidupan masyarakat serta adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Kabupaten Enrekang dipilih karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana upaya yang dilakukan dapat memengaruhi produktivitas pertanian, khususnya dalam budidaya bawang merah. Pelaksanaan penelitian di Kabupaten Enrekang juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dinamika yang terjadi di lapangan terkait upaya peningkatan kualitas dan hasil pertanian.

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dengan waktu kurang lebih hingga 2 (dua) bulan. Mulai dari pemenuhan izin penelitian hingga pada tahap penyusunan laporan penelitian.

### **2.3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua data ini untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan komperhensif terkait peran pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian: studi kasus komoditas bawang merah.

#### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung. Data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, kelompok tani dan petani komoditas bawang merah di Kabupaten Enrekang.

#### **2) Data Sekunder**

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada sebelumnya. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, artikel jurnal dan lain-lain (Anwar et al., 2022). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa artikel jurnal dan dokumen resmi meliputi laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang serta Dinas Tamanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Data sekunder ini berfungsi untuk mengvalidasi dan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan.

### **2.4. Informan Penelitian**

Informan merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan terhadap suatu kegiatan atau peristiwa. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan relevansi mereka dalam konteks penelitian. Purposive sampling merupakan cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang

dikehendaki oleh peneliti. Pemilihan sampel bertujuan untuk mendapatkan informan yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian (Asrullah et al., 2023). Adapun informan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang
- b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang
- c) Kelompok Tani bawang merah Kabupaten Enrekang
- d) Petani bawang merah Kabupaten Enrekang

## **2.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai peran pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian: studi kasus komoditas bawang merah. Teknik yang digunakan meliputi:

### **2.5.1. Wawancara Mendalam (in-depth interview)**

Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi kualitatif secara rinci dan menyeluruh dari informan, sehingga penulis dapat memahami secara mendalam pemikiran dan perasaan informan terkait isu yang sedang diteliti (Hanipah, 2023).

### **2.5.2. Observasi**

Observasi merupakan proses pengamatan langsung dilokasi penelitian. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari fenomena yang diamati (Hanipah, 2023).

### **2.5.3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses atau hasil dari mencatat, merekam, atau menyimpan informasi secara tertulis, visual, atau audio mengenai suatu kejadian, aktivitas, proses atau data. Dokumentasi berfungsi sebagai sarana untuk menjaga catatan yang akurat dan terstruktur tentang berbagai hal (Hanipah, 2023).

## **2.6. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian khususnya komoditas bawang merah di Kabupaten Enrekang pada rentang tahun 2020-2024. Penelitian ini secara khusus akan menyoroti beberapa aspek kunci yang berkaitan peran pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengembangan komoditas unggulan bawang merah.

Berdasarkan pendapat di atas, agar proses penelitian lebih terstruktur maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

### **1) Peran Pemerintah pada aspek pemasaran**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam hal pemasaran meliputi kebijakan dan upaya dalam memperluas akses pasar, menciptakan sistem pemasaran yang stabil dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan saluran distribusi.

### **2) Peran Pemerintah pada aspek permodalan**

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengatasi keterbatasan akses permodalan yang dihadapi petani bawang merah, khususnya petani skala kecil dan mandiri. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan dan program pemerintah daerah terkait penyediaan serta perluasan akses pembiayaan, termasuk pendampingan teknis pengelolaan usaha tani dan sosialisasi berbagai skema pembiayaan yang tersedia.

### **3) Peran Pemerintah pada aspek infrastruktur**

Fokus penelitian selanjutnya adalah peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur pertanian yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi dan distribusi bawang merah.

## **2.7. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh kemudian direduksi terlebih dahulu kemudian disajikan untuk menggambarkan kondisi yang sedang diteliti. Model analisis data

Miles dan Huberman memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menginterpretasikan data kualitatif, memastikan bahwa analisis yang dilakukan mendalam, sistematis dan valid (Miles et al., 2014).

### 1) Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan proses awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti berperan aktif dalam menggali data secara mendalam dari informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan kontekstual, sehingga memungkinkan peneliti menangkap makna, pandangan, serta pengalaman subjek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan data. Tahap ini menjadi fondasi penting bagi proses analisis selanjutnya (Miles et al., 2014).

### 2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyaring data dengan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Data yang tidak berkaitan atau berulang dieliminasi, sedangkan data penting dikelompokkan ke dalam tema atau kategori tertentu. Proses reduksi data membantu peneliti dalam mengorganisasi data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis secara mendalam. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, bukan hanya setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian, peneliti dapat menjaga fokus analisis dan meningkatkan ketajaman interpretasi data (Miles et al., 2014).

### 3) Penyajian Data

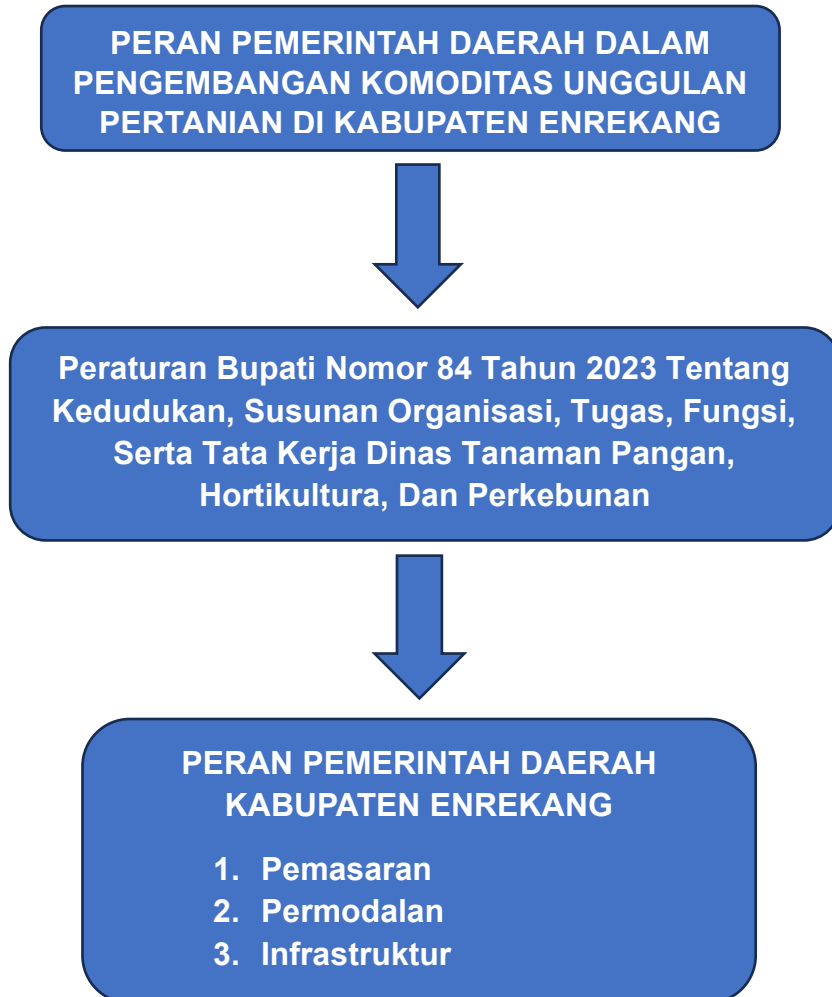
Penyajian data merupakan tahap penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks,

atau bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori dan tema penelitian. Penyajian data bertujuan membantu peneliti melihat pola, kecenderungan, serta keterkaitan antar informasi yang diperoleh dari lapangan. Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat melakukan analisis lanjutan secara lebih mendalam dan terarah. Tahap ini juga memudahkan peneliti dalam merumuskan makna dan implikasi dari temuan penelitian. Penyajian data menjadi jembatan penting antara reduksi data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

#### 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan dengan data lapangan, melakukan triangulasi sumber, serta memastikan konsistensi antar kategori dan tema. Tahap ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Kesimpulan akhir disusun setelah peneliti merasa yakin bahwa data yang dianalisis telah menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014).

## 2.8. Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian**

*Sumber: Penulis, 2025*